

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Andriansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa Cetakan Pertama*, Fisip Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2015.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Cetakan Ke Empat*, Ghalia, Jakarta, 1981.
- Ahmad Djafri, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Revisi*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- Djatmiati, Tatiek Sri, *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis dalam Pelayanan Publik*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dan Bidang Hukum Universitas Airlangga, 2007.
- Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gaja Mada University Press, 2005.
- , *et al*, *Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- , *et. al.*, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada University Press, 2011.
- , *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-12, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- , *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo, Jakarta, 2006.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Ilmar, Amiruddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

- Mahbub, Muzayyin, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Moenta, H Andi Pangerang dan Syafa`at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Pt Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia “*Online Single Submission*”, Panduan Penggunaan Registrasi OSS Versi 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *User Manual Permohonan Berusaha Non Peseorangan, OSS, Version 1.6*, 2019.
- Mahbub, Muzayyin, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Moenta, H. Andi Pangerang, dan Syafaat Anugerah Pratama, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Priatna, I Ketut Hadi, *Pelaksanaan Sistem Online Single Submission & Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Yogyakarta, 2009.
- Quina, Margareta, Angela Vania, *Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission*, Seri Lembar Informasi (ICEL), 2019.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2009.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar, Edisi Kedua Cetakan Ke 9*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Sinambela, Lijan Poltak, et.,all, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Implementasi)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Spelt dan Berge, disunting oleh Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Suara Pembaharuan, ‘‘Perizianan *Offline* Sulit Dihindari’’ Senin 19 November 2018.
- Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah (setelah perubahan UUD 1945)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Sujatmoko, Emanuel, *Bentuk Hukum Kerjasama Antar Daerah*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (cetakan ketujuh)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

B. JURNAL/MAKALAH

- Fadhilah, Nurul Laili, ‘‘Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi Di Daerah’’, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Tahun 1, No 2, Desember 2016.
- Erwiningsih, Winahyu, ‘‘Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (*Bestuurshandeling*) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum’’, *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, September 2004: 137-157
- Hadjon, Philipus M, ‘‘Tentang Wewenang’’, *Makalah*, Tanpa Tahun.
- Muskibah, ‘‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal’’, *Inovatif*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, No. 5, Jambi, 2011.
- Nuriyanto, ‘‘Penyelenggraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State?’’, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

Bambang Arwanto, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*, *Yuridika*, Volume 31 Nomor 3, Surabaya, 2016.

Sipahutar, Changsen, dkk, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah", *Jurnal Fakultas Hukum*, Sumatera Utara, 2018.

Suhayat, Monika, "Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System)", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR*, Vol. X, No.23/I/Puslit/Desember/2018, Jakarta Pusat.

Wijaya, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Palu", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015.

C. TESIS/DISERTASI

Djatmiati, Tatiek Sri, "Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, h. 85-86.

Pudjiastuti, Lilik, *Perinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian*, *Disertasi* Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Rizki, Muhammad, "Kedudukan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Disertasi* Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2014.

D. INTERNET/WEBSITE

Anonim, *Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c0642171e7fc/konsekuensi-apabila-perusahaan-belum-memiliki-nomor-induk-berusaha/>, diakses tanggal 30 Oktober 2019.

Aldin, Ihya Ulum, Kepala BKPM Akui Izin OSS Terkendala Software dan Konektivitas, Berita 6 Februari 2019, Katadata.co.id.
<https://katadata.co.id/berita/2019/02/06/kepala-bkpm-akui-sistem-izin-oss-terkendala-software-dan-konektivitas>, diakses tanggal 23 September 2019.

Dedy, Irfan, *Dasar Umum Dan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*,
https://www.academia.edu/29044589/Dasar_Umum_Dan_Asas-asas_Hukum_Administrasi_Negara_Dasar_Umum_Dan_Asas-asas_Hukum_Administrasi_Negara Diakses Tanggal 27 Agustus 2019.

Dinas Penanaman Modal Kulonprogo, Yogyakarta, <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/pages-46-mekanisme-perizinan.html>, diakses tanggal 30 Oktober 2019.

Heriani, Fitri N, Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi/>, diakses Tanggal 21 Agustus 2019.

Irawan, Dedi, *Poin-poin Penting dalam Proses Pengajuan Izin Usaha Melalui OSS*, <https://www.easybiz.id/poin-poin-penting-dalam-proses-pengajuan-izin-usaha-melalui-oss/>, diakses tanggal 21 agustus 2019.

Klik Legal, Penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional Berdasarkan Komitmen Oleh Lembaga OSS. 17 Juli 2018. <https://kliklegal.com/penerbitan-izin-usaha-dan-izin-komersial-atau-operasional-berdasarkan-komitmen-oleh-lembaga-oss/>. Diakses tanggal 27 Oktober 2019.

Klik Legal.com, *Inilah Proses Perizinan Yang Wajib Melalui OSS dan Tetap di BKPM*, <https://kliklegal.com/ini-proses-perizinan-yang-wajib-melalui-oss-dan-tetap-di-bkpm/>, diakses tanggal 30 Oktober 2019.

Liberia, “Sistem OSS Mempermudah Anda Mengurus Perizinan Usaha Secara Online”, <https://libera.id/blogs/online-single-submission-oss-sistem-perizinan-usaha-baru/>, diakses tanggal 20 September 2019.

Quraini, Hamalatul, Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus direvisi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bcc0df105bb5/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi>, diakses tanggal 23 September 2019.

Portal Informasi Indonesia, Perizinan Berusaha Melalui OSS, <https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>, diakses tanggal 23 September 2019.

Pudjarwati, Sri, Peraturan Menteri agrarian dan Tata Ruang, <https://slideplayer.info/slide/15741769/>, diakses tanggal 30 Oktober 2019.

Setyowati, Hermin Esti, “Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia”, <https://ekon.go.id/press/view/oss-online-single-submission.4093.html>, diakses tanggal 11 September 2019.